



Tunggakan PBB Yogya Capai Rp 47 Miliar

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta hingga akhir 2014 ternyata mencapai Rp 47 miliar. Tunggakan itu terhitung mulai dari 1994.

"Tunggakan itu bukan hanya saat PBB dikelola pemkot saja, tetapi termasuk peninggalan saat dikelola KPP Pratama," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, saat penyerahan Surat Pem-

beritahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB di Yogyakarta, Kamis (26/2). Menurut dia, tunggakan PBB saat masih dikelola KPP Pratama sebesar Rp 32 miliar dan ketika dikelola Pemkot Yogyakarta sejak 2012 ada tunggakan Rp 15 miliar.

Tunggakan pajak tersebut, menurut Kadri, lebih banyak disebabkan karena wajib pajak tidak lagi tinggal di Kota Yogyakarta. Selain itu, kata dia, juga karena terjadi sengketa antara pemilik aset bangunan. Untuk mengurangi tunggakan pajak tersebut, ia mengatakan, pada tahun ini

DPDPK akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran, khususnya pembayaran PBB pada 2014.

Dengan begitu, kata dia, wajib pajak bisa mengetahui besaran jumlah tunggakannya. Rencananya, kata dia, SPPT akan didistribusikan ke kecamatan dan kelurahan untuk kemudian diberikan kepada wajib pajak. Ia menargetkan SPPT itu sampai pada wajib pajak paling lambat 31 Maret. Kadri mengatakan, para wajib pajak yang menunggak PBB ini akan dikenai denda sebesar dua persen per bu-

matan menjelang jatuh tempo pembayaran.

Mengenai penerimaan PBB Kota Yogyakarta tahun ini, Kadri memperkirakan akan naik signifikan. Menurut dia, ketetapan PBB Kota Yogyakarta pada tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp lima miliar menjadi Rp 57,1 miliar dari tahun sebelumnya Rp 52 miliar.

Kenaikan ketetapan itu, kata dia, seiring dengan naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam kelas pada tahun ini. Sedangkan jumlah wajib pajak hampir sama dengan tahun lalu, yaitu

92 ribu wajib pajak. "NJOP naik, maka otomatis besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak mengalami kenaikan," kata dia.

Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Titik Sulastri berharap realisasi penerimaan PBB tahun ini mencapai lebih dari seratus persen. Karena, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pendanaan pembangunan di Yogyakarta. "Karenanya, kami mengimbau wajib pajak untuk taat pajak," ujar dia.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005